

Analisis Kawasan Andalan Di Jawa Tengah

Analisis Kawasan Andalan in Central Java

AMIN PUJIATI

**Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
Gedung C6 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Tel. 024.8508015, e-mail apuji06@yahoo.co.id**

Diterima; Disetujui

Abstract : This research aims to identify a region as a key region in Central Java . The data was got from the Indonesian Central Bureau of Statistics in 2001 and 2005. The analysis is used klassen typology, location quotient and regional specialization. Klassen typology result can be concluded that the district with the growth of Gross Domestic Regional Bruto and Gross Domestic Regional Bruto per capita are high than other district which have high economic position growth. The result analysis of location quotient, the basic sector in a key region tends to dominate by the secondary and tertiary sector. Index regional specialization result, the district which included in a key region tends to be high than the undeveloped region. Index regional specialization result inter key region tends to the diversification sector. While, between a key region and undeveloped region tends to the specialization sector and inter undeveloped region.

Keywords : key region, klassen typology, location quotient, regional specialization.

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam institusi nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses, baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2000).

Pembangunan ekonomi nasional telah memberi hasil positif apabila dilihat pada tingkat rata tingkat pendapatan riil per kapita mengalami peningkatan. Namun dilihat pada tingkat mikro, pembangunan telah menciptakan suatu kesenjangan yang besar, baik dalam bentuk *personal income distribution* maupun dalam bentuk kesenjangan ekonomi/ pendapatan antar daerah/ propinsi (Tambunan, 2001).

Menyadari salah satu realitas pembangunan adalah terciptanya kesenjangan pembangunan antar daerah dan antar kawasan, maka pemerintah mencoba untuk melakukan perubahan konsep pembangunan dari pendekatan sektoral ke pendekatan regional. Pendekatan pengembangan wilayah tersebut, dilakukan melalui penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN) yang bertujuan mengembangkan pola dan struktur ruang nasional melalui pendekatan kawasan dan diimplementasikan melalui penetapan kawasan adalah (Witoelar, 2000).

Kawasan andalan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (*prime mover*) yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang lebih cepat tumbuh dibandingkan daerah lainnya dalam suatu propinsi, memiliki sektor unggulan, dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar (*hinterland*) (Royat, 1996). Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar melalui pemberdayaan sektor-sektor unggulan sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antardaerah. Penekanan pada pertumbuhan ekonomi sebagai arah kebijakan penetapan kawasan andalan adalah mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel ekonomi yang menjadi indikator kunci dalam pembangunan (Kuncoro, 2000).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003, Propinsi Jawa Tengah telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRW) yang berdasar UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Dalam Peraturan Daerah tersebut yang dimaksud dengan kawasan andalan adalah kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sendiri dan kawasan di sekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang wilayah nasional. Adapun yang termasuk kawasan andalan berdasar Peraturan Daerah tersebut adalah Cilacap dan sekitarnya, Kebumen dan sekitarnya, Borobudur dan sekitarnya, Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten), Wanarakuti (Juwana, Jepara, Kudus, dan Pati), Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi), Bregas (Brebes, Tegal, dan Slawi).

Penetapan kawasan andalan yang diharapkan menjadi penggerak perekonomian wilayah dengan ciri kawasan yang lebih cepat

tumbuh dibandingkan daerah lainnya nampaknya belum bisa optimal. Hal ini bisa dilihat dari posisi perekonomian, khususnya pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita, hanya ada lima kabupaten yang memenuhi ciri sebagai kawasan andalan yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, dan Kota Salatiga. Kelima kabupaten/kota tersebut memiliki pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB dan PDRB per kapita Propinsi Jawa Tengah yaitu 3,47 persen dan Rp 3.575.838,05.

Berdasarkan kenyataan dan permasalahan pembangunan di Propinsi Jawa Tengah tersebut, perlu adanya evaluasi kembali penetapan kawasan andalan sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak perekonomian wilayah. Permasalahan yang timbul adalah perlu diketahuinya posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah, sektor ekonomi yang menjadi unggulan masing-masing kabupaten/kota baik yang termasuk dalam kawasan andalan maupun bukan kawasan andalan, serta tingkat spesialisasi regional antar daerah di kawasan andalan dan bukan kawasan andalan.

Sesuai permasalahan tersebut maka tujuan artikel ini adalah mengidentifikasi kawasan andalan dan kawasan bukan andalan di Propinsi Jawa Tengah, menganalisis sektor ekonomi unggulan yang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian pada kawasan andalan dan bukan andalan, serta menganalisis tingkat spesialisasi sektor lapangan usaha antar daerah di kawasan andalan dan kawasan bukan andalan.

METODE

Teori Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Model pertumbuhan neoklasik dipelopori oleh Robert M. Solow (1950). Model ini merupakan pengembangan dari formulasi *Harrod-Domar* dengan menambahkan faktor tenaga kerja, faktor modal, serta variabel teknologi. Model pertumbuhan neoklasik

berpegang pada konsep skala hasil yang berkurang (*diminishing returns*) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah. Jika keduanya dianalisis secara bersamaan atau sekaligus, Solow juga memakai asumsi skala hasil tetap. Kemajuan ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri oleh Solow diasumsikan bersifat eksogen atau selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor (Todaro, 2000).

Teori Basis Ekonomi. Teori basis ekonomi (*economic base theory*) menyatakan bahwa sektor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berkaitan dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah, seperti penggunaan sumber daya tenaga kerja dan bahan baku yang akan menghasilkan kekayaan daerah dan dapat menciptakan peluang kerja (*job creation*). Teori basis ekonomi dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan apakah suatu sektor atau industri merupakan sektor/industri *basic* atau *non basic* (Blakely 2002, Hayter 2000, Hoover 1971).

Teori Kutub Pertumbuhan. Teori ini dikembangkan oleh Francois Perroux pada tahun 1950. Perroux menekankan bahwa proses pertumbuhan ekonomi modern berbeda dari konsep stasioner dari pertumbuhan keseimbangan. Alasannya adalah konsep mendasar dari spasial, seperti halnya sektoral, pembangunan tidak terjadi di semua tempat secara simultan dan keseluruhan. Pertumbuhan menyebabkan titik-titik atau kutub-kutub pembangunan yang bervariasi tingkat intensitasnya dan ekonomi eksternal yang diciptakan akan mendorong proses pertumbuhan dalam keseluruhan wilayah

Spesialisasi dan Pembagian Kerja. Menurut Samuelson dan Nordhaus (1995) masyarakat dapat lebih efektif dan efisien jika terdapat pembagian kerja yang membagi keseluruhan proses produksi menjadi unit-unit khusus yang terspesialisasi. Ekonomi spesialisasi telah memungkinkan terbentuknya jaringan perdagangan antar individu dan antar negara yang demikian luas, yang merupakan ciri dari

suatu perekonomian maju. Adanya keterkaitan ekonomi (spesialisasi) antar daerah yang mendorong proses pertukaran sesuai kebutuhan masing-masing, akan memungkinkan Bergeraknya perekonomian masing-masing daerah secara bersama-sama menuju proses pertumbuhan.

Penelitian Terdahulu. Shields (2003) melakukan penelitian sektor unggulan di Pennsylvania Amerika Serikat dengan alat analisis LQ. Penelitiannya menyimpulkan bahwa sektor industri, transportasi perdagangan eceran merupakan sektor unggulan/basis. Adapun sektor pertanian, pertambangan, bangunan, perdagangan besar, keuangan, real estate dan pemerintah bukan merupakan sektor unggulan/non basis.

Aswandi dan Kuncoro (2002) melakukan penelitian tentang kawasan andalan di Kalimantan Selatan pada tahun 1993-1996. Alat analisis yang digunakan adalah Tipologi Klassen, LQ, Indeks Spesialisasi Regional dengan *Logit Multinomial Logistic Regression Model*. Variabel yang digunakan adalah PDRB, PDRB Perkapita, dan indeks spesialisasi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertimbangan penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan hanya berdasarkan pada pendapatan perkapita dan sektor unggulan. Selain itu, pertumbuhan PDRB dan spesialisasi daerah ternyata tidak menjadi bahan pertimbangan penetapan kawasan andalan.

Kusuma Dewi (2002) melakukan penelitian tentang kawasan andalan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada tahun 1993-1996. Alat analisis yang digunakan adalah Tipologi Klassen, LQ, Indeks Spesialisasi Regional dengan *Model Logit*. Variabel yang digunakan meliputi PDRB, PDRB per kapita, dan indeks spesialisasi. Kesimpulannya adalah bahwa hanya variabel PDRB per kapita yang berpengaruh terhadap klasifikasi kawasan andalan. Adapun variabel pertumbuhan PDRB dan indeks spesialisasi tidak berpengaruh terhadap klasifikasi kawasan andalan.

Jenis dan Sumber Data. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data-

data tersebut meliputi data PDRB Propinsi Jawa Tengah berdasarkan lapangan usaha, PDRB Propinsi Jawa Tengah menurut kabupaten/kota, PDRB per kapita tiap kabupaten/kota tahun 2001 hingga 2005.

Definisi Operasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. Pada studi ini PDRB yang digunakan adalah PDRB berdasar harga konstan tahun 2000. PDRB per kapita adalah jumlah PDRB kabupaten/kota dibagi jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota. Indeks spesialisasi regional adalah indeks untuk mengetahui tingkat spesialisasi sektor lapangan usaha antar daerah. Dalam studi ini indeks yang digunakan adalah *indeks Krugman*. Adapun cara pengukurannya merupakan perbandingan antara PDRB sektor i di kab/kota j dibagi total PDRB kab/kota j terhadap PDRB sektor i di kab/kota k dibagi total PDRB kab/kota.

Analisis Tipologi Klassen. *Tipologi Klassen* pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dalam studi ini pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB, sedangkan pendapatan per kapita daerah diukur dengan PDRB per kapita. Daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Syafrihal 1997, Kuncoro 1993, Hill 1989).

Analisis Location Quotient (LQ). Analisis LQ digunakan untuk menentukan sektor unggulan perekonomian daerah. Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut (Bendavid-Val, 1991)

$$LQ = \frac{X_n / RV_r}{X_n / RV_n} \quad \text{atau} \quad LQ = \frac{X_r / X_n}{RV_r / RV_n}$$

Keterangan :

X_r : Nilai produksi sektor i pada daerah kabupaten/kota
 RV_r : Total PDRB kabupaten/kota
 X_n : Nilai produksi sektor i pada daerah propinsi yang diacu
 RV_n : Total PDRB propinsi yang diacu

Kriteria pengukuran LQ yaitu jika $LQ > 1$ berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah kabupaten/kota lebih besar daripada sektor yang sama di tingkat propinsi. Jika $LQ < 1$ berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah kabupaten/kota lebih kecil daripada sektor yang sama di tingkat propinsi. Jika $LQ = 1$ berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah kabupaten/kota sama dengan sektor yang sama di tingkat propinsi.

Analisis Spesialisasi Regional. Analisis indeks spesialisasi regional digunakan untuk mengetahui tingkat spesialisasi sektor lapangan usaha antar daerah di daerah studi dengan menggunakan *Indeks Krugman* sebagaimana digunakan oleh Kim (1995).

$$SI_{jk} = \left| \frac{\sum_{i=1}^n \frac{X_{ij}}{E_j} - \frac{X_{ik}}{E_k}}{E_j - E_k} \right|$$

Keterangan :

SI_{jk} : Indeks spesialisasi kabupaten j dan k
 E_{ij} : PDRB sektor i pada kabupaten j
 E_j : Total PDRB kabupaten j
 E_{ik} : PDRB sektor i pada kabupaten k

Kriteria pengukurannya menurut Kim (1995) adalah jika indeks spesialisasi regional mendekati nol maka kedua daerah j dan k tidak memiliki spesialisasi, dan jika indeks spesialisasi regional mendekati dua maka kedua daerah j dan k memiliki spesialisasi. Batas tengah antara angka nol dan dua tersebut adalah satu. Oleh karena itu, nilai indeks spesialisasi yang lebih besar daripada satu dapat dianggap sebagai sektor/subsektor yang memiliki spesialisasi. Untuk

melihat tinggi rendahnya tingkat spesialisasi suatu daerah terhadap daerah lainnya, sebagai pembandingan dipergunakan nilai rata-rata indeks spesialisasi seluruh daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah rata-rata pertumbuhannya selama tahun 2001 – 2005 menunjukkan hasil yang positif. Namun ada satu kota yang rata-rata pertumbuhan PDRB-nya negatif, artinya terjadi penurunan meskipun kalau dilihat pertumbuhan per tahunnya tidak semuanya terjadi penurunan. Kota yang rata-rata pertumbuhan PDRB-nya turun adalah Kota Semarang.

Pada tahun 2001, pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh Kota Tegal yaitu sebesar 8,06 persen. Sektor dengan kontribusi terbesar di kota Tegal adalah perdagangan, hotel dan restoran yaitu 23,75 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berkontribusi paling besar pada PDRB Kota Tegal, namun jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya masih kalah. Kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah yang sektor perdagangan, hotel dan restoran punya kontribusi besar adalah Kabupaten Semarang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Kudus. Sedangkan kota yang mempunyai pertumbuhan PDRB terkecil pada tahun 2001 adalah Kota Semarang yaitu sebesar -15,32 persen. Turunnya pertumbuhan PDRB kota Semarang ini disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan beberapa sektor usaha. Sektor usaha yang terjadi penurunan adalah sektor pertanian yang kontribusinya hanya 0,68 persen. Angka ini terendah di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Demikian juga kontribusi sektor industri yang termasuk sektor penyumbang PDRB terbesar. Sektor industri di kota Semarang hanya tumbuh sebesar 31,56 persen. Angka ini jauh tertinggal dari Kabupaten Kudus dan Kabupaten Cilacap yang mencapai 60,13 persen dan 48,84 persen.

Tahun 2002 terjadi pergeseran pertumbuhan PDRB kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.

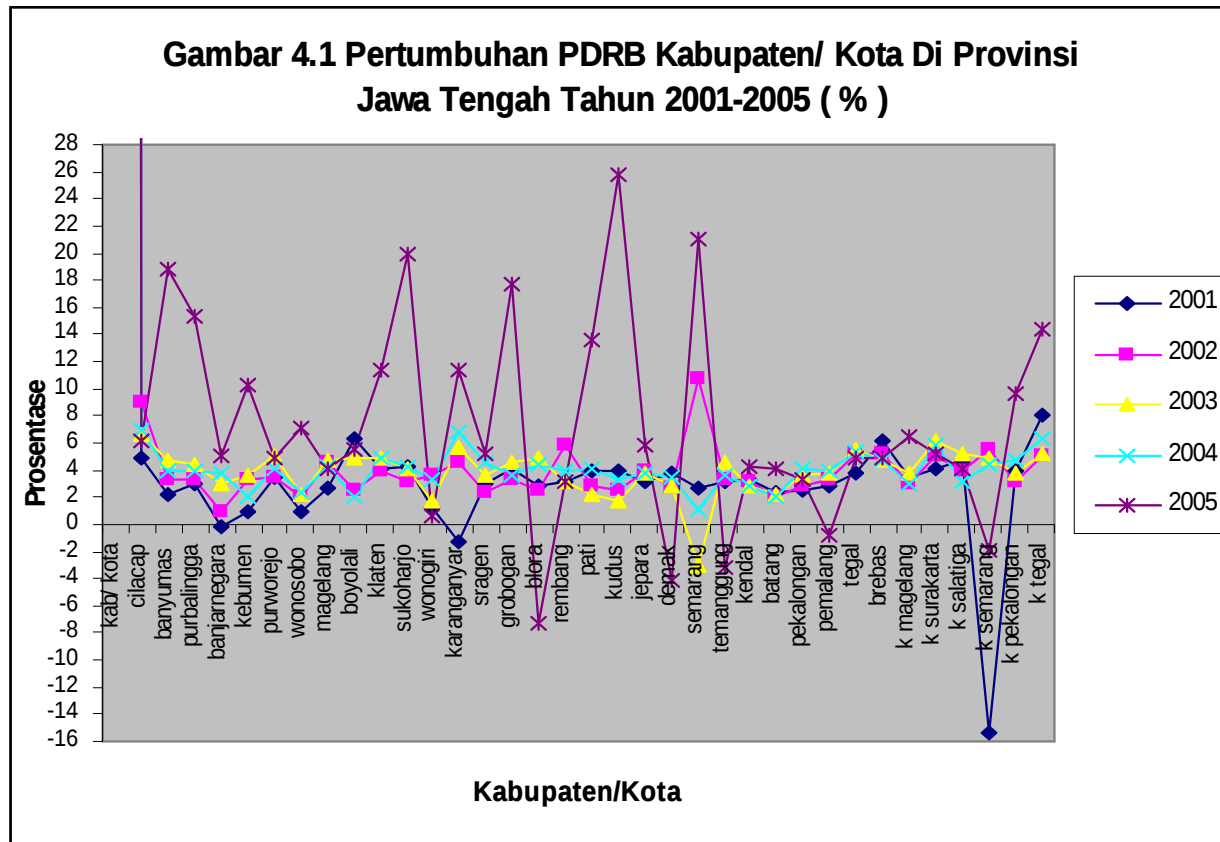
Kabupaten/ kota yang mencapai pertumbuhan PDRB tertinggi adalah Kabupaten Semarang sebesar 10,77 persen. Angka ini jauh di atas angka rata-rata pertumbuhan PDRB kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,72 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya kontribusi beberapa sektor lapangan usaha. Sektor lapangan usaha yang mengalami kenaikan adalah sektor pertanian, industri, perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan kabupaten yang memiliki pertumbuhan PDRB terendah pada tahun 2002 adalah Kabupaten Banjarnegara yaitu sebesar 0,95 persen, yang mengalami penurunan di sektor pertanian. Kinerja Kabupaten Semarang pada tahun 2002 dilihat dari pertumbuhan PDRB-nya paling tinggi, berbeda dengan tahun 2003 justru pertumbuhan PDRB-nya paling rendah dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2003 pertumbuhan PDRB kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah selain Kabupaten Semarang hampir sama, demikian juga pada tahun 2004.

Pada tahun 2005 kabupaten/kota yang pertumbuhan PDRB-nya tertinggi adalah Kabupaten Kudus. Kontribusi terbesar adalah sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran. Sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Kudus sangat dominan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Kudus sebagai daerah industri terutama industri tembakau, kertas dan percetakan menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Wilayah yang pertumbuhan PDRB-nya mengalami penurunan atau negatif adalah Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Semarang. Kabupaten-kabupaten tersebut, selain Kabupaten Semarang, merupakan daerah pertanian yang pada tahun 2005 tersebut mengalami perubahan musim yang tidak sesuai dengan prediksi sehingga banyak produksi pertanian yang gagal panen atau terserang hama. Gambar 1 mengilustrasikan beberapa kabupaten/ kota yang pertumbuhan PDRB-nya negatif atau terjadi penurunan yaitu Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Pemalang, dan Kota Semarang.

PDRB per kapita merupakan salah satu

indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Tahun 2001 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang PDRB per kapitanya tertinggi adalah Kabupaten Kudus yaitu sebesar Rp 11.048.967,8. Sektor yang mempunyai kontribusi tinggi pada PDRB Kabupaten Kudus adalah sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah

yang selalu meningkatkan fasilitas-fasilitas yang mendukung investasi, seperti perizinan pelayanan satu atap (*one stop service*), pembangunan terminal kecil untuk transit di sekitar lokasi obyek pariwisata Menara Kudus, dan penertiban pasar-pasar. Selama periode pengamatan 2001-2005, Kabupaten Kudus tetap menduduki urutan pertama posisi PDRB per kapita.



Sumber : BPS, data diolah

Adapun selama tahun pengamatan 2001 – 2005 kabupaten/ kota yang nilai PDRB per kapitanya relatif rendah adalah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, dan kabupaten Tegal. Rendahnya PDRB per kapita di ketiga kabupaten ini seiring dengan rendahnya PDRB. Nilai PDRB per kapita selain dipengaruhi nilai PDRB juga dipengaruhi faktor jumlah penduduk. Dengan demikian membandingkan nilai PDRB per kapita harus memperhatikan jumlah penduduk, di samping memperhatikan komponen PDRB. Di Kabupaten Grobogan sektor yang menonjol adalah sektor pertanian,

namun dari tahun ke tahun tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tahun 2001 kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Grobogan sebesar 45,94 persen. Prosentase ini terbesar kedua setelah Kabupaten Brebes, sedangkan sektor industri hanya 3,73 persen. Kecilnya kontribusi sektor industri di Kabupaten Grobogan ini mengharuskan pemerintah daerah menciptakan iklim kondusif bagi penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Sektor industri disinyalir dapat menghasilkan nilai tambah yang besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan

pendapatan daerah. Demikian juga di Kabupaten Kebumen, kontribusi sektor pertanian pada PDRB terbesar yaitu sebesar 39,39 persen, sedangkan kontribusi sektor industri hanya 9,34 persen. Untuk lebih jelasnya gambaran PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar 2.

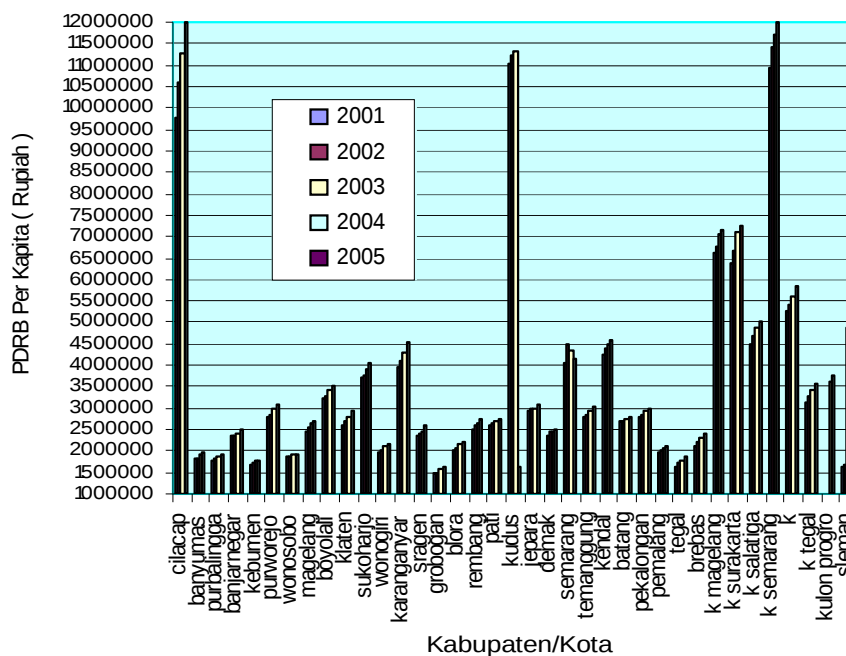
Analisis Tipologi Klassen dalam hal ini membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB dan rata-rata PDRB per kapita lebih tinggi daripada tingkat propinsi

yang diacunya.

2. Daerah maju tetapi tertekan adalah daerah yang memiliki rata-rata PDRB per kapita lebih tinggi tetapi rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB lebih rendah daripada tingkat propinsi yang diacunya.
3. Daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB lebih tinggi tetapi rata-rata PDRB per kapita lebih rendah daripada tingkat propinsi yang diacunya.
4. Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB dan rata-rata PDRB per kapita lebih rendah daripada tingkat propinsi yang diacunya.

Gambar 4.2
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah
Tahun 2001 - 2005 (Rupiah)



Sumber : BPS, 2006

Terdapat tujuh kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB dan rata-rata PDRB per kapita lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah. Beberapa wilayah yang termasuk daerah cepat tumbuh dan cepat berkembang adalah Kabupaten Kudus,

Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Kabupaten Semarang, dan Kota Pekalongan. Kabupaten Cilacap sebagai daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh memiliki pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan Propinsi Jawa Tengah sepanjang

Kabupaten Cilacap. Di samping itu, sektor yang mempunyai kontribusi besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 32,96 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran didukung oleh obyek-obyek wisata yang cukup menarik turis baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Seperti halnya kabupaten Cilacap, kabupaten Sukoharjo termasuk daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Kabupaten Sukoharjo pertumbuhan PDRB-nya relatif stabil dengan rata-rata 3,93 persen, namun nilai ini masih lebih tinggi dibandingkan Propinsi Jawa Tengah yaitu 3,47 persen. Sektor yang paling menonjol adalah sektor industri khususnya industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil dan industri kayu, serta industri kertas yang menyumbang sebesar 26,06 persen pada tahun 2001, kemudian tahun 2002 naik menjadi 26,34 persen dari total PDRB-nya. Perkembangan sektor industri ini dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang berarti. Pada tahun 2003 sektor ini mampu menyumbang sebesar 26,40 persen sedangkan pada tahun 2004 naik lagi menjadi 31,46 persen.

Kabupaten lain yang masuk kategori daerah cepat tumbuh dan cepat berkembang adalah Kabupaten Karanganyar. Kabupaten yang secara geografis berdekatan dengan kabupaten Sukoharjo ini juga mengalami pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan Propinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan yang tinggi ini juga didukung oleh sektor sekunder yaitu sektor industri. Meskipun rata-rata pertumbuhan PDRB pada tahun 2001 turun menjadi -1,28 persen namun pada tahun 2004 mampu naik menjadi 6,79 persen.

Berdasarkan pola dan struktur pertumbuhannya, daerah tepat dijadikan kawasan andalan dilihat dari persyaratan pertumbuhannya adalah kabupaten/kota yang tergolong daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Dengan demikian Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Kabupaten Semarang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Kudus merupakan kawasan andalan di Propinsi Jawa Tengah.

Adapun wilayah yang termasuk kategori

daerah maju tetapi tertekan adalah Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Magelang, dan Kota Salatiga. Kabupaten dan kota tersebut adalah kabupaten/kota yang memiliki rata-rata PDRB per kapita lebih tinggi daripada PDRB Propinsi Jawa Tengah, tetapi rata-rata tingkat pertumbuhan PDRBnya lebih rendah daripada Propinsi Jawa Tengah.

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah justru memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB yang paling rendah yaitu -0,15 persen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya industri tekstil yang gulung tikar akibat krisis moneter sehingga berdampak terhadap PDRB. Pertumbuhan PDRB paling kecil terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar -15,32 persen. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Tengah saat itu sebesar 0,59 persen. Dilihat dari PDRB per kapitanya, Kabupaten Kudus menduduki posisi tertinggi. Hal ini disebabkan kenaikan dukungan sektor utamanya, yaitu industri makanan, minuman dan tembakau serta industri kayu dan kertas. Meskipun terdapat anjuran berhenti merokok demi menjaga kesehatan dari berbagai pihak, namun industri rokok tetap eksis dan menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB.

Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah yang tergolong daerah berkembang cepat yaitu daerah yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB lebih tinggi tetapi rata-rata PDRB per kapita lebih rendah daripada tingkat Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pati.

Kabupaten Blora merupakan kabupaten yang memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB paling rendah yaitu 1,45 persen. Hal ini disebabkan oleh sumbangan terbesar yang didominasi sektor pertanian, meskipun sektor tersebut perannya semakin turun dalam perekonomian nasional. Kabupaten Purworejo memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB tertinggi yaitu sebesar 4,22 persen. Kontribusi terbesarnya diperoleh dari sektor industri dan perdagangan,

hotel dan restoran.

Wilayah di Propinsi Jawa Tengah yang termasuk klasifikasi relatif tertinggal adalah periode pengamatan. Pertumbuhan PDRB sepanjang tahun pengamatan tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 8,98 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan PDRB di Jawa Tengah hanya 4,72 persen. Pertumbuhan PDRB yang tinggi ini karena dukungan sektor industri yang menyumbang 49,55 persen dari total PDRB Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Blora. Di antara kabupaten-kabupaten tersebut, Kabupaten Demak dan Kabupaten Blora memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB sangat rendah. Kabupaten Demak memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB 1,72 persen, sedangkan Kabupaten Blora memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB 1,45 persen. Rendahnya pertumbuhan PDRB ini disebabkan karena di kedua kabupaten tersebut sektor paling dominan adalah sektor pertanian yang relatif kurang berkembang dan masih tradisional.

Hasil perhitungan nilai LQ menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota yang berada pada

kawasan andalan maupun bukan andalan di Propinsi Jawa Tengah mempunyai nilai LQ yang lebih besar daripada satu untuk beberapa sektor lapangan usahanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh kabupaten/kota tersebut memiliki sektor unggulan.

Sebagian besar kabupaten/kota yang termasuk dalam kawasan andalan memiliki sektor unggulan yang sama yaitu listrik, gas dan air bersih, serta bangunan, kecuali Kabupaten Cilacap. Unggulnya sektor listrik, gas, dan air bersih ini mengingat kabupaten/kota ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Banyaknya kegiatan rumah tangga, usaha, industri dan umum yang dilakukan menyebabkan pemakaian listrik banyak. Kabupaten Cilacap memiliki sektor unggulan industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini bisa dimengerti karena sektor yang paling dominan adalah industri pengolahan. Demikian juga obyek-obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Cilacap masih menarik minat turis baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi lain, Kabupaten Sukoharjo merupakan satu-satunya kabupaten yang termasuk kawasan andalan karena memiliki sektor unggulan di sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena struktur perekonomiannya masih didominasi pertanian atau sektor-sektor primer dan masih relatif luasnya lahan pertanian.

Tabel 1
Klasifikasi Rata-Rata Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota
di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 – 2005

Kabupaten/Kota	Posisi Perekonomian		Klasifikasi
	Pertumbuhan PDRB (%)	PDRB Per Kapita (Rupiah)	
Kawasan Andalan			
Kudus	7,42	11.941.468,99	Cepat maju dan cepat tumbuh
Sukoharjo	7,14	4.054.336,96	
Cilacap	6,70	11.263.225,68	
Semarang	6,54	4.420.180,49	
Karanganyar	5,40	4.390.560,98	
K.Surakarta	5,23	6.922.498,38	
K.Pekalongan	5,10	5.627.900,58	

Kabupaten/Kota	Posisi Perekonomian		Klasifikasi
	Pertumbuhan PDRB (%)	PDRB Per Kapita (Rupiah)	
Kawasan Bukan Andalan			
Kendal	3,32	4.490.318,35	Maju tetapi tertekan
K. Magelang	3,94	7.032.560,78	
K. Semarang	-0,15	4.420.180,49	
K. Salatiga	4,19	4.866.407,57	
Banyumas	6,63	1.978.491,26	Berkembang cepat
Purbalingga	6,00	1.915.528,02	
Boyolali	4,26	3.427.069,57	
Klaten	5,85	2.843.500,83	
Grobogan	6,65	1.610.715,20	
Tegal	4,93	1.787.425,40	
Brebes	5,14	2.297.208,26	
Pati	5,30	2.755.825,66	
K. Tegal	7,78	3.499.128,19	
Banjarnegara	2,53	2.437.964,42	Relatif tertinggal
Kebumen	3,94	1.779.123,22	
Wonosobo	2,92	1.919.193,52	
Wonogiri	2,10	2.089.748,54	
Sragen	3,76	2.493.227,20	
Demak	1,72	2.430.941,89	
Batang	2,53	2.734.015,73	
Pekalongan	3,30	2.915.583,66	
Purworejo	4,22	2.988.066,13	
Jepara	4,12	3.029.604,33	
Magelang	4,06	2.632.290,90	
Rembang	3,80	2.643.864,45	
Pemalang	2,65	2.058.418,52	
Temanggung	2,33	2.877.872,65	
Blora	1,45	2.100.597,38	
Jawa Tengah	4,23	3.638.895,66	

Sumber : Data diolah

Kabupaten/kota yang termasuk daerah maju tetapi tertekan justru memiliki sektor unggulan di sektor industri, kecuali Kota Magelang. Kota Semarang memiliki keunggulan industri makanan, minuman dan tembakau, serta industri tekstil. Unggulnya sektor industri pengolahan terutama disebabkan oleh banyaknya usaha industri kecil dan rumah tangga, khususnya yang bergerak di bidang garmen. Di Kota Magelang tidak ada sektor pertambangan dan penggalian sehingga sektor tersebut tidak memiliki kontribusi sama sekali.

Di daerah berkembang cepat, sektor unggulan yang dimiliki tiap kabupaten/kota

bervariasi dan tidak mempunyai pola khusus. Hanya saja hal yang menarik di Kota Tegal, kondisinya sama dengan Kota Magelang, yaitu tidak ada kontribusi sektor pertambangan dan penggalian. Kabupaten/kota yang termasuk dalam daerah relatif tertinggal memiliki kesamaan sektor unggulan yang dimiliki yaitu sektor pertanian, kecuali kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan memiliki keunggulan di sektor bangunan, keuangan dan jasa-jasa. Hal ini didukung oleh sub sektor sewa bangunan, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.

Dalam pemberdayaan sektor unggulan yang perlu dipertimbangkan adalah dilakukannya

interaksi/pertukaran perekonomian melalui keterkaitan sektor unggulan masing-masing daerah, baik antar daerah di kawasan andalan, antar daerah di kawasan andalan dan bukan andalan maupun antar daerah di kawasan bukan andalan dalam suatu propinsi dan antar daerah yang berbatasan langsung akan tetapi tidak terletak dalam satu propinsi, misalnya antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Magelang, atau antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang. Terdapatnya perbedaan sektor unggulan dapat diarahkan pada terjadinya pertukaran komoditas antar daerah tersebut atau keterkaitan *complementary*, sedangkan kesamaan sektor unggulan pada masing-masing daerah diarahkan pada terciptanya keterkaitan agregat.

Berdasarkan perhitungan, nilai rata-rata indeks spesialisasi regional seluruh kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah Jawa Tengah adalah 0,58 berarti lebih mengarah pada diversifikasi lapangan usaha meskipun masih kurang. Nilai indeks spesialisasi antar daerah pada kawasan andalan, yaitu antara kabupaten Cilacap dengan dengan Kota Surakarta sebesar 0,89. Hal ini menunjukkan bahwa antar kedua kabupaten tersebut cenderung terdapat spesialisasi sektor lapangan usaha. Nilai indeks spesialisasi antar kawasan andalan terendah terjadi antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar yaitu sebesar 0,24 yang berarti sudah mengarah diversifikasi sektor lapangan usaha.

Indeks spesialisasi regional antara kawasan andalan dengan kawasan bukan andalan terbesar terjadi antara Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Salatiga masing-masing sebesar 1,22; 1,30; 1,14; 1,16; 1,17; 1,10 dan 1,24. Hal ini berarti bahwa antara Kabupaten Cilacap sebagai kawasan andalan dengan kabupaten lainnya yang bukan kawasan andalan cenderung terjadi spesialisasi sektor lapangan usaha. Adapun indeks spesialisasi Kabupaten Kebumen sebesar 1,28, Kabupaten Wonosobo sebesar

1,13, Kabupaten Wonogiri sebesar 1,31, Kabupaten Pati sebesar 1,06, dan Kabupaten Demak sebesar 1,00.

Nilai indeks spesialisasi antar kawasan bukan andalan terjadi spesialisasi yaitu antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Wilayah yang indeks spesialisasi regionalnya menunjukkan terjadinya spesialisasi adalah Kota Magelang. Kota Magelang mempunyai kecenderungan spesialisasi sektor lapangan usaha dengan kabupaten lainnya. Adapun kabupaten lain cenderung mengarah ke diversifikasi sektor lapangan usaha.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuh kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi cepat maju dan cepat tumbuh, empat kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi daerah maju tetapi tertekan, sembilan kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi berkembang cepat dan lima belas kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi relatif tertinggal. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor unggulan di kawasan andalan cenderung didominasi sektor sekunder dan tersier. Analisis indeks spesialisasi regional menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang termasuk kawasan andalan relatif cenderung lebih tinggi daripada di kawasan bukan andalan. Indeks spesialisasi regional antar kawasan andalan mengarah ke diversifikasi sektor usaha. Sedangkan antara kawasan andalan dan bukan andalan cenderung mengarah ke spesialisasi sektor usaha, demikian pula antar kawasan bukan andalan juga mengarah ke spesialisasi.

Dilandasi temuan-temuan tersebut, dikemukakan saran agar posisi perekonomian suatu wilayah sebagai penentu kebijakan perlu diperhatikan sehingga keberadaan kawasan andalan perlu ditinjau dari waktu ke waktu secara

berkesinambungan agar manfaat yang diperoleh bagi pertumbuhan daerah dan wilayah sekitarnya benar-benar dapat dirasakan. Selain itu, terdapatnya perbedaan sektor unggulan antar daerah baik antar daerah kawasan andalan, antara kawasan andalan dan bukan andalan, antar kawasan bukan andalan hendaknya dapat diarahkan pada terjadinya pertukaran komoditas antar daerah atau keterkaitan *complementary*. Pengembangan perekonomian suatu daerah melalui kebijakan pembangunan yang serasi dan efektif sebaiknya perlu koordinasi dan kerjasama antar wilayah baik yang berada dalam satu provinsi maupun di daerah perbatasan provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, Hairul dan Kuncoro, M. 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993 – 1999. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol 17, No. 1, hal. 27-45.
- Bappeda. 2001. Penyusunan Peraturan Daerah Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. *Jawa Tengah Dalam Angka 2001 – 2006*.
- Bendavid-Val, Avrom. 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practioners*. New York : Prager.
- Blakely, Edward. 2002. *Planning Local Economic Development Theory and Practice*. New Delhi : Sage Publications.
- Hayter, Roger. 2000. *The Dynamics of Industrial Location: The Factory, The Firm and The Production System*. Chichester : John Wiley & Son.
- Hill, H (Ed). 1989. *Unity and Diversity : Regional Economic Development in Indonesia since 1970*. Oxfort : University Press.
- Hoover, Edgar M. 1971. *An Introduction to Regional Economics*. New York : Alfred A. Knopf, Inc.
- Kim, S. 1995. Expansion of Markets and The Geographic Distribution of Economic Activities : The Trends in U.S. Regional Manufacturing Structure 1860–1987. *Quartely Journal of Economics*. Vol. 10, p.881–908.
- Kuncoro. 2001. *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : AMP YKPN.
- Kusuma Dewi, Nadya. 2002. *Analisis Kawasan Andalan Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Penggerak Perekonomian di Propinsi DIY dan Sekitarnya*. Skripsi FE UGM. Tidak dipublikasikan.
- Royat, Sujana. 1996. Pembangunan Ekonomi Regional dan Upaya Menunjang Pertumbuhan KAPET Dalam Kaitannya Dengan Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. *Manajemen Usahawan Indonesia*, No.12 Tahun XXV hal. 14-17.
- Samuelson, Paul A and Nordhaus, William D. 1996. *Maroekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Syafrizal. 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. *Prisma*. LP3ES. Tahun XXVI hal. 27–38.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia, Teori dan Penemuan Empiris*. Jakarta : Salemba Empat.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Witoelar, Erna. 2000. Pengelolaan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Pendekatan Pengembangan Wilayah. *Makalah Lokakarya Nasional-Dies Natalis Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada*.